

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia secara geografis merupakan sebuah Negara yang terdiri banyak kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari pada daratan dan memiliki pantai terpanjang di Dunia dengan garis pantai lebih 81.000 km,¹ sehingga tidak heran jika Negara Indonesia disebut sebagai Negara maritim.

Luasnya wilayah lautan di Indonesia menjadikan peluang besar untuk kemajuan perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat pada sektor kelautan melalui penyediaan pekerjaan dan penyediaan pangan dalam negeri. Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah pada sektor kelautan sebagai penggerak perekonomian nasional yaitu melalui kontribusi Produk Domestic Bruto (PDB) pada Negara.

Produk Domestik Bruto pada sektor perikanan dan kelautan Negara Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan dan kelautan meningkat pada kuartal 1 2015 mencapai 8,64 % (persen) dibandingkan dengan kuartal 1 2014 yang hanya mencapai 7,46 % (persen). Sektor perikanan memang tumbuh lebih

¹ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan Dan Perebutan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006), 1.

tinggi di bandingkan dengan sektor lainnya seperti pertanian, perternakan, perburuan dan jasa serta kehutanan yang hanya tumbuh sebesar 2,94 % (persen).²

Namun faktanya pergerakan pertumbuhan industri kelautan dan pendapatan para nelayan di Indonesia masih berjalan secara stagnan, bahkan mengalami penurunan dan para nelayan masih banyak berada pada garis kemiskinan. Kemiskinan pada nelayan merupakan masalah yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi seperti masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengelola sumber daya perikanan, keterbatasan modal, keterbatasan akses, lembaga ekonomi yang belum berfungsi secara optimal, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat nelayan ialah kurangnya permodalan dalam menjalankan usaha nelayannya karena lembaga keuangan yang kurang optimal. Banyak lembaga keuangan yang berada di daerah pesisir tidak begitu memihak masyarakat nelayan yang memiliki penghasilan tidak menentu, sehingga pihak lembaga keuangan memberikan persyaratan yang rumit untuk menghindari risiko tinggi pada pinjaman yang diberikan. Masyarakat nelayan terpaksa untuk meminjam pada rentenir karena tanpa persyaratan yang rumit namun dengan bunga tinggi yang mengakibatkan permasalahan pada nelayan semakin bertambah bukannya berkurang.

² <http://cnnindonesia.com> Ekonomi, diterbitkan Senin, 18 Mei 2015, Pukul 18:50. Diakses pada Hari Rabu, 14 Desember 2016 Pukul 05:22.

Melihat banyaknya masyarakat nelayan memiliki permasalahan yang menyebabkan mereka pada garis kemiskinan, diperlukan suatu kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya dapat menyentuh langsung pada masyarakat nelayan miskin seperti sarana yang efektif dalam memfasilitasi untuk pembentukan kelembagaan sosial ekonomi/keompok/paguyuban yang relevan dalam konteks dapat memberdayakan, karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan dapat melalui suatu pemberdayaan (*empowering*) yang berkaitan langsung dengan mereka.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberadaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan melalui potensi yang dimiliki oleh masyarakat.³

Menurut Kartasasmita, dikutip dari jurnal Manat Rahim, Nadjiani Tahir dan Waly Aya Rumbia yang berjudul “*Model pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Buton,*

³ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), 263-264.

Sulawesi Tenggara”, pemberdayaan penduduk miskin dengan kebijakan penanggulangan dilaksanakan melalui tiga arah kebijakan. *Pertama*, kebijaksanaan tidak langsung diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin setiap upaya penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, kebijaksanaan langsung ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. *Ketiga*, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin dan aparat yang bertanggungjawab langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk penanggulangan kemiskinan.⁴

Pemerintah memandang potensi wilayah pesisir sangat besar, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga perlu adanya sebuah program berkelanjutan yang dapat menyentuh langsung kesasarannya sehingga mampu memperdayakan masyarakat nelayan yang sampai saat ini masih terjerat kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, agar dapat memperkuat posisi masyarakat nelayan dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Kegiatan pemberdayaan dapat berbasis kelembagaan sosial ekonomi dan kerakyatan, karena dengan adanya organisasi sosial ekonomi masyarakat dapat dihimpun, dikelola dan diberdayakan secara efektif untuk mendukung pemberdayaan

⁴ Manat Rahim, Madjjani Tahir dan Waly Aya Rumbia, *Model Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara*, Jurnal The Winners Vol. 15 No. 1, Maret 2014, Diakses pada tanggal 09 Januari 2016 pukul 20:31 WIB, 24.

masyarakat dan pembangunan wilayah.⁵ Pada tahun 2006 telah diluncurkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan program Kelompok Usaha Bersama yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat miskin.

Kelompok Usaha Bersama merupakan salah satu kebijakan program pemerintah untuk menentaskan kemiskinan pada masyarakat, program yang telah diresmikan sejak tahun 2006 hingga saat ini masih berjalan dan mampu memberdayakan masyarakat miskin terutama pada masyarakat daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Kelompok Usaha Bersama adalah salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat yang memiliki berbagai kegiatan positif seperti kegiatan simpan-pinjam, pelatihan, usaha ekonomi produktif, kegiatan perkumpulan dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memandirikan, memampukan, dan memiliki daya saing dalam berbagai bidang.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kota yang wilayah bagian utaranya berbatasan langsung dengan perairan laut Jawa, terdapat dua kecamatan yang terletak di daerah pesisir dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan yaitu Kecamatan Paciran dan Brondong. Tepatnya di Kecamatan Brondong, Kelurahan Brondong jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak ± 1.298 Jiwa, yang terbagi menjadi 2 yaitu nelayan miyang

⁵ Tim Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir PSKP Jember, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta: PT LKiS Yogyakarta, 2007), 26.

(tangkap jaring) dan nelayan puket cangkrag (tangkap dengan alat besar yang dapat merusak ekosistem laut).⁶ Pada kenyataannya masyarakat nelayan di Brondong rata-rata merupakan masyarakat kalangan menengah kebawah, dikarenakan pendapatan sebagai nelayan yang selalu tidak stabil (kadang naik, kadang turun, kadang tidak mendapatkan apa-apa). Hal seperti ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain cuaca yang tidak menentu, kesehatan nelayan, risiko kecelakaan nelayan, keterbatasan modal untuk berlayar, dan kondisi kapal yang rusak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kelurahan Brondong untuk mengatasi masalah tersebut adalah membentuk lembaga kelompok sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan. Kelompok tersebut dinamakan Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya. Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya adalah kelompok yang dibentuk oleh kelompok masyarakat nelayan tangkap miyang aktif dengan mendapatkan persetujuan dari kepala Kelurahan Brondong dan mendaftarkan ke Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Lamongan untuk dikukuhkan menjadi Kelompok Usaha Bersama yang terdaftar di dinas kabupaten. Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya sebagai wadah nelayan di kelurahan Brondong untuk dapat berkembang dan mandiri dengan harapan para nelayan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kelompok ini dibentuk pada tanggal 15 Januari 2011 dan aktif dalam kegiatannya pada tahun

⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya Bapak Suyanto tentang Jumlah Nelayan di Desa Brondong, pada tanggal 14 November 2016.

2012 dengan binaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Lamongan. Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya diketuai oleh Bapak Suyanto dan dikelola bersama 2 anggota badan pengurus harian serta 10 anggota masyarakat nelayan aktif.

Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya mempunyai 3 program yaitu *Pertama*, Usaha Simpan-Pinjam Nelayan (USPN) ialah pemberian pinjaman kepada nelayan aktif yang digunakan untuk modal usaha atau modal kerja nelayan. *Kedua*, Penyediaan Barang Nelayan (PBN) ialah menjual barang kebutuhan khusus untuk persediaan nelayan saat melakukan pelayaran menangkap ikan seperti es batu balok. *Ketiga*, Bantuan Paceklik ialah pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan tangkap sekitarnya pada masa paceklik berupa beras.

Dengan adanya berbagai program yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan untuk menjadi masyarakat yang nelayan yang berdaya, mandiri dan mampu keluar dari jalur kemiskinan. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam islam bahwa sesama umat manusia diwajibkan untuk saling tolong menolong, meringankan beban saudaranya dan dapat menjadi masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana dalam firman Allah pada Q.S. al-Maidah [4]:2.⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَإِنَّمَا لِلَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 142.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya untuk memperkuat posisi masyarakat nelayan yaitu melalui modal usaha atau modal kerja yang bersifat pinjaman yang sedari dulu menjadi kendala bagi masyarakat nelayan dalam memperoleh permodalan. Pinjaman yang diberikan oleh Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya merupakan program Usaha Simpan-Pinjam Nelayan. Program Usaha Simpan-Pinjam Nelayan adalah pinjaman modal kerja atau modal usaha yang diberikan kepada nelayan tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian, pinjaman dapat digunakan untuk perbaikan kapal, pembelian jaring, perbaikan mesin, pembelian peralatan yang berkaitan dengan kebutuhan nelayan, dan usaha pengolahan hasil laut. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan dengan cara angsuran disaat nelayan mendapat hasil sehingga tidak memberatkan pihak masyarakat nelayan tersebut, dan jika pinjaman tersebut telah dikembalikan secara sepenuhnya oleh masyarakat nelayan maka akan disalurkan kembali kepada masyarakat nelayan lainnya yang membutuhkan modal usaha sehingga dapat membantu masyarakat nelayan lainnya untuk memperoleh modal yang dapat menciptakan rasa tolong menolong sesama masyarakat nelayan.

Dalam atmosfer kebahagiaan dan keberuntungan seperti itu, orang yang tidak begitu membutuhkan keperluan pribadi. Jika ada yang memerlukan utang,

maka ia akan diberi utang tanpa bunga oleh kawan atau kerabatnya yang kurang lebih sama-sama dalam kemudahan seperti dirinya.⁸ Seandainya kawan atau kerabatnya itu tidak dapat memberi hutang maka dapat saja baitul mall, perbankan syariah dan kelompok organisasi seperti Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya dapat memberikan hutang.

Pada pinjaman yang diberikan Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya melalui program Usaha Simpan-Pinjam Nelayan berupa pinjaman modal kerja atau usaha tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian, mengingatkan bahwa dalam ekonomi Islam pinjaman tersebut merupakan pembiayaan *al-Qarḍ*.

Al-Qarḍ atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁹

Pembiayaan *al-Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqh klasik*, *Qarḍ* dikategorikan dalam *aqd- tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁰ Dalam pembiayaan *al-Qarḍ* mengutamakan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dan bukan untuk mencari sebuah keuntungan finansial semata

⁸Muhammad Sharif Chaudhry, Terj Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic System)*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 330.

⁹ Heru Sulistyono dan Abdul Hakim, *Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan*, Jurnal Riptek Vol. 7, No. 1, Tahun 2013, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2016 pukul 20:42 WIB, 41.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2001), 131.

karena tujuannya adalah sosial atau saling membantu untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan pada Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya melalui program Usaha Simpan-Pinjam Nelayan yaitu dengan judul ***“Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dengan Pinjaman Modal Melalui Program Usaha Simpan-Pinjam Nelayan Ditinjau Dari Ekonomi Islam”*** studi kasus Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya kelurahan Brondong kecamatan Brondong kabupaten Lamongan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan dengan pinjaman modal melalui program Usaha Simpan Pinjam Nelayan ditinjau dari ekonomi islam pada Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya di kelurahan Brondong kecamatan Brondong kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan dengan pinjaman modal melalui program Usaha Simpan Pinjam Nelayan ditinjau dari ekonomi islam pada Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya di kelurahan Brondong kecamatan Brondong kabupaten Lamongan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya

Sebagai bahan informasi tentang pemberdayaan nelayan bagi Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya dan mengukur sejauh mana keberhasilan Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya dalam memberdayakan masyarakat nelayan dengan pinjaman modal melalui program Usaha Simpan-Pinjam Nelayan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan acuan memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya terutama dalam upaya menjalankan perannya memberdayakan masyarakat nelayan.

2. Bagi Masyarakat Nelayan

sebagai media perantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan mengenai harapan-harapan mereka terhadap program-program yang dapat memberdayakan.

3. Bagi Akademisi

Menambah wawasan keilmuan tentang Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya dengan pinjaman modal melalui program Usaha Simpan-Pinjam Nelayan ditinjau dari ekonomi islam dan peran program tersebut dalam memberdayakan masyarakat nelayan.

D. Kajian pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, tidak terdapat penelitian yang sama di kelurahan Brondong kecamatan Brondong kabupaten Lamongan

yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, namun ada beberapa penelitian yang mirip dengan judul peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rusli Nurdin Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur pada tahun 2012 dengan judul *“Pemberdayaan Nelayan Melalui Program Pelatihan Bengkel Nelayan Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”*. Hasil penelitian menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan bengkel nelayan yang difokuskan pada manajemen pelatihan yang dilakukan antara Kelompok Usaha Bersama bekerja sama dengan P2MKP dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) serta dampak pelatihan bengkel yang diberikan kepada nelayan.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Eko Wahyudi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 dengan judul *“Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”*. Hasil penelitian menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat nelayan dengan membentuk sebuah Kelompok Usaha Bersama dilakukan oleh kelompok nelayan. Program pada kelompok nelayan ini berupa bantuan modal dan peralatan alat tangkap, hasil yang diperoleh masyarakat nelayan setelah adanya pemberdayaan, dan untuk mengetahui

¹¹ Ruslin Nurdin, *Pemberdayaan Nelayan Melalui Program Pelatihan Bengkel Nelayan Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*, (Surabaya: skripsi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur, 2012).

faktor pendukung serta penghambat pada proses pemberdayaannya untuk menjadikan masyarakat nelayan lebih maju dari pada sebelumnya.¹²

Dari kajian terdahulu, dapat diketahui perbedaan judul yang diangkat peneliti dengan penelitian terdahulu adalah obyek dan isi teori yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Rusli Nurdin Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” terletak pada lokasi yang berbeda, menggunakan teori pemberdayaan, dan program pemberdayaan yaitu melalui program pelatihan bengkel yang diberikan kepada nelayan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama yang bekerja sama dengan P2MKP dari Dinas Perikanan dan Kelautan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dan *al-Qard*, pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program Usaha Simpan Pinjam Nelayan yaitu pemberian modal yang dapat digunakan untuk perbaikan kapal, pembelian jaring, perbaikan mesin, dan pembelian peralatan yang berkaitan dengan kebutuhan nelayan.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Achmad Eko Wahyudi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya memiliki kesamaan pada sebuah Kelompok Usaha Bersama nelayan, namun terdapat perbedaan yang terletak pada teori yang digunakan dan program yaitu menggunakan teori pemberdayaan dan *Hibah* pemberian modal oleh pihak Kelompok Usaha Bersama kepada nelayan diberikan

¹² Achmad Eko Wahyudi, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*, (Surabaya: skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

melalui pemberian bantuan berupa GPS dan modal secara gratis atau *Hibah*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dan *al-Qarḍ* dan pemberian modal dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berupa hutang yang tidak berbunga dalam islam disebut pembiayaan *al-Qarḍ*.

E. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memberikan uraian yang jelas, maka peneliti akan menyusun urutan pembahasan dalam penyusunan skripsi yang telah dilakukan. Urutan pokok pembahasan dari skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan Pinjaman Modal melalui Program Usaha Sinpam-Pinjam Nelayan Ditinjau dari Ekonomi Islam” (Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan), sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini memuat penjelasan tentang pembiayaan *al-Qarḍ* (konsep dasar, dasar hukum, rukun dan syarat, manfaat, skema, manajemen risiko), dan pemberdayaan (pengertian, tujuan, tahapan, strategi, indikator, dan pemberdayaan dalam islam).

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, objek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan tentang temuan dilapangan terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum Kelompok Usaha Bersama Bahari Jaya seperti profil, visi dan misi, tujuan, program, jumlah anggota dan sumber dana. Menjelaskan Usaha Simpan-Pinjam Nelayan, skema, jumlah penerima, mekanisme penyaluran, manajemen risiko. Analisis pemberdayaan dengan pembiayaan Usaha Simpan-Pinjam Nelayan, dan tingkat presentase pemberdayaan pada masyarakat nelayan yang menerima pembiayaan.

Bab V: Penutup. Kesimpulan dan saran.